

**KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**(Studi Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana**

Rifky Dwi Putra Ambuliling

NIM: 312015075



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
NOVEMBER 2018**



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFKY DWI PUTRA AMBULILING

NIM : 312015075

Email : 312015075@student.uksw.edu

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul tugas akhir : KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017)

Pembimbing : Dr. Umbu Rauta S.H., M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 10 November 2018



Rifky Dwi Putra Ambuliling

Tanda tangan & nama terang mahasiswa



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIFKY DWI PUTRA AMBULILING
NIM : 312015075 Email : 312015075@student.uksw.edu
Fakultas : HUKUM Program Studi : ILMU HUKUM
Judul tugas akhir : KONSTITUSIONAL SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak *copyright* atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 10 November 2018

RIFKY DWI PUTRA AMBULILING

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Umbu Rauta S.H., M.Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing

Lembar Persetujuan

**KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**(Studi Terhadap Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017)**

SKRIPSI

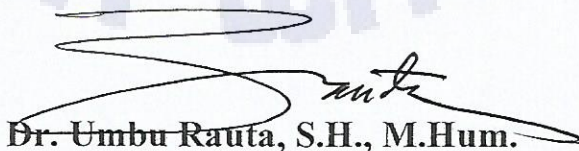
**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen**

Satya Wacana

Rifky Dwi Putra Ambuliling

NIM: 312015075

Pembimbing



Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.

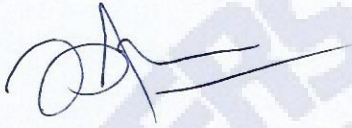
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

November 2018

Lembar Pengujian

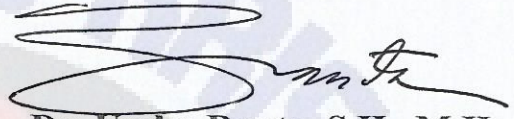
Komisi Penguji

Penguji I



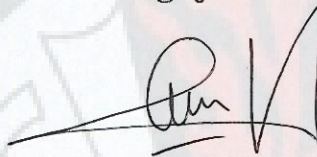
Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H

Penguji II



Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum

Penguji III



Ninon Melatyugra, S.H., M.H

Diuji Pada Tanggal 22 November 2018

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Maribor Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum.

MOTTO

***“Jika Engkau Tawar Hati Pada Masa Kesusakan,
Kecillah Kekuatanmu”¹***

¹ Amsal 24 ayat (8)

KATA PENGANTAR

Isu esensial dalam penulisan skripsi ini adalah apakah bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah perlu di batasi, sedangkan orang tersebut telah selesai menjalankan hukumannya dan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Skripsi ini akan mengkritisi kaidah mengenai syarat calon kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah, dalam Peraturan KPU yang menurut penulis bertentangan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*), teori pendelegasian kewenangan (*delegated legislation*), teori hak konstiusional warga negara khususnya hak politik (*political rights*) dan teori hukuman ganda (*double jeopardy*). Penulisan skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang terdiri dari empat bagian besar, yang sebagaimana akan penulis deskripsikan di bawah ini.

Pertama, Bab I dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang dilakukannya penulisan skripsi ini dengan menjelaskan dalil yang menjadi titik pijak penulisan skripsi ini, serta metodologi penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya, pada Bab II penulis akan mengkaji teori hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*), teori pendelegasian kewenangan (*delegated legislation*), teori hak konstiusional warga negara khususnya hak politik (*political rights*) dan teori hukuman ganda (*double jeopardy*), terhadap kaidah syarat calon kepala daerah mantan terpidana dalam ketentuan *a quo*, sebagai ketentuan yang diskriminatif serta bertentangan dengan hukum.

Kemudian, dalam Bab III penulisan ini, penulis akan menganalisis kaidah tentang syarat calon kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, dimana kaidah tersebut membatasi hak konstiusional khususnya mantan terpidana yang telah selesai menjalankan hukumannya dan telah bebas dari hukuma. Hak konstiusional yang dimaksud adalah hak politik warga negara khususnya hak calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana

yang dibatasi oleh Peraturan KPU. Sehingga menurut penulis kaidah *a quo* tidak valid.

Akhirnya pada Bab IV, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan esensi dari uraian pembahasan dalam Bab II dan Bab III sebagai akhir pernyataan penelitian skripsi ini, serta akan memberikan saran untuk dapat dilakukan perbaikan ataupun perubahan khususnya terhadap kaidah syarat calon kepala daerah mantan terpidana yang tertuang dalam Peraturan KPU.

Salatiga, 22 November 2018

Rifky Dwi Putra Ambuliling

ABSTRAK

Skripsi Ini mengkaji tentang konstitusionalitas syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf h tentang syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota atau Pilkada.

Terkait dengan kaidah dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, penulis berpendapat bahwa kaidah tersebut bertentangan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan (*stufenbau theory*), teori pendelegasian kewenangan (*delegated legislation*), teori hak konstitusional warga negara khususnya hak politik (*political rights*) dan teori hukuman ganda (*double jeopardy*), dimana, jika Peraturan KPU tersebut diberlakukan secara terus menerus akan mengakibatkan tercidainya hak konstitusional warga negara sebab ketentuan tersebut adalah diskriminatif, atau bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: *konstitusionalitas, mantan terpidana, hierarki peraturan perundang-undangan, pendelegasian kewenangan, hak politik, hukuman ganda, Pilkada.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Tidak Plagiat	ii
Lembar Pernyataan Persetujuan Akses	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengujian	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Motto	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Abstrak	xv
Daftar Peraturan dan Kasus	xvi
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
 BAB II. LANDASAN TEORI	 17
A. TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (<i>Stufentbau Theory</i>).....	18
B. TEORI PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	

	<i>(Delegated Legislation)</i>	26
C.	TEORI HAK KONSTITUSIONAL (<i>Constitutional Rights</i>).....	38
	Hak Politik (<i>Political Rights</i>).....	44
D.	TEORI HUKUMAN GANDA (<i>Double Jeopardy</i>)	50

BAB III. ANALISIS TEHADAP PASAL 4 AYAT (1) HURUF H PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017..... 53

A.	Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan (<i>Stufentbau Theory</i>).....	54
B.	Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Teori Pendelegasian Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (<i>Delegated Legislation</i>)	57
C.	Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Teori Hak Konstitusional Khususnya Hak Politik (<i>Political Rights</i>)	60
D.	Pasal 4 Ayat (1) Huruf h, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Teori Hukuman Ganda (<i>Double Jeopardy</i>)...	63

BAB. IV PENUTUP 65

A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA..... 67